



---

## **Peran Strategis UMKM dalam Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Covid-19: Analisis Deskriptif di Provinsi Kalimantan Barat**

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
Tukkot Hamonangan Immanuel Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia <a href="mailto:tukkot.h.immanuel@itbss.ac.id">tukkot.h.immanuel@itbss.ac.id</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Anani, R., Abdussamad, Z. Tome, A. H., Marpaung, E. (2025). Analisis Yuridis Pasal 280 Ayat (1) huruf C & F Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Untuk Mewujudkan Demokrasi Bermartabat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4991-4996.

### **Abstrak**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran UMKM dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi lokal. Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, keterbatasan akses permodalan, serta lemahnya pengelolaan manajerial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penguatan UMKM yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kalimantan Barat.

**Kata Kunci:** UMKM, pemulihan ekonomi, ekonomi daerah, Covid-19, Kalimantan Barat

### **Abstract**

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting regional economic recovery and growth in the post-Covid-19 pandemic period. This study aims to describe the role of MSMEs in regional economic recovery and growth in West Kalimantan Province. The research employs a descriptive qualitative approach using secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS), the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, and the Provincial Office of Cooperatives and MSMEs of West Kalimantan. The findings indicate that MSMEs contribute significantly to the formation of Gross Regional Domestic Product (GRDP), employment absorption, and the strengthening of the local economy. However, MSMEs continue to face several challenges, including limited human resource quality, low digital literacy, constrained access to capital, and weak managerial capabilities. Therefore, integrated and sustainable MSME strengthening policies are required to enhance competitiveness and ensure the long-term sustainability of MSMEs in West Kalimantan.

**Key Words:** MSMEs, economic recovery, regional economy, Covid-19, West Kalimantan.

## A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional dan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta penciptaan lapangan kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Keberadaan UMKM sebagai bagian dari sektor riil terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, baik pada masa normal maupun pada situasi krisis. Fleksibilitas, daya tahan, dan kemampuan beradaptasi menjadikan UMKM sebagai aktor ekonomi yang relatif tangguh dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan bisnis.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk terhadap keberlangsungan UMKM. Pembatasan mobilitas, penurunan daya beli masyarakat, serta gangguan rantai pasok menyebabkan banyak UMKM mengalami penurunan kinerja usaha (BPS, 2021). Namun demikian, pada fase pascapandemi, UMKM justru menunjukkan peran penting dalam proses pemulihan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal dan menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari 64 juta unit dan berkontribusi sekitar 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Di tingkat daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Barat, UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB daerah (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2023).

Meskipun memiliki peran yang strategis, UMKM di Kalimantan Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural dan manajerial. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya literasi digital, keterbatasan akses permodalan, serta lemahnya pengelolaan usaha menjadi tantangan utama yang memengaruhi kinerja dan keberlanjutan UMKM (Tambunan, 2020). Oleh karena itu, kajian mengenai peran strategis UMKM dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19 menjadi relevan untuk dilakukan.

Meskipun UMKM memiliki peran strategis dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah, keberadaannya masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan mendasar. Pertama, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas manajerial masih menjadi kendala utama. Banyak pelaku UMKM menjalankan usaha secara tradisional tanpa perencanaan usaha dan pengelolaan keuangan yang memadai (Tambunan, 2020).

Kedua, rendahnya literasi dan pemanfaatan teknologi digital menghambat UMKM dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing (OECD, 2021). Ketiga, keterbatasan akses terhadap permodalan formal menyebabkan UMKM sulit melakukan ekspansi dan inovasi usaha. Keempat, ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah serta lemahnya pemanfaatan potensi lokal berdampak pada tingginya biaya produksi.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kalimantan Barat per 31 Januari 2023

No	Regency/City	Micro Enterprise	Small Enterprise	Medium Enterprise	Total
1	Sambas Regency	14,248	3,880	158	18,286
2	Bengkayang Regency	4,756	992	19	5,767
3	Landak Regency	32,030	2,173	330	34,533
4	Mempawah Regency	15,632	1,459	108	17,199
5	Sanggau Regency	2,644	1,266	61	3,971
6	Ketapang Regency	7,277	1,673	157	9,107

7	Sintang Regency	14,854	2,121	106	17,081
8	Kapuas Hulu Regency	6,706	3,156	65	9,927
9	Sekadau Regency	4,348	1,813	222	6,383
10	Melawi Regency	3,540	747	39	4,326
11	Kayong Utara Regency	7,027	671	-	7,698
12	Kubu Raya Regency	7,586	2,340	18	9,944
13	Pontianak City	39,697	1,943	217	41,857
14	Singkawang City	7,494	2,094	205	9,793
<b>Total</b>		<b>168,989</b>	<b>26,328</b>	<b>1,705</b>	<b>195,022</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat (2023)

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Koperasi dan UKM, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah laporan resmi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

## C. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Kontribusi UMKM terhadap PDRB daerah dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor ini menjadi motor penggerak utama ekonomi lokal pascapandemi Covid-19 (BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2023).

Distribusi UMKM yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya Kota Pontianak, mencerminkan peran pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, potensi pengembangan UMKM di wilayah kabupaten masih sangat besar dan perlu didukung melalui kebijakan penguatan kapasitas usaha, peningkatan literasi digital, serta akses pembiayaan yang lebih inklusif (OECD, 2021).

Data dalam tabel digunakan sebagai dasar analisis deskriptif yang menjadi bahan pembahasan. Tabel tersebut secara jelas menampilkan kondisi aktual UMKM yang dapat dikaji secara objektif dan menunjukkan eksistensi UMKM secara positif. Dalam kondisi nyata, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pada setiap wilayah kota pasti menghadapi persaingan yang ketat. Setiap pelaku usaha dituntut untuk bekerja keras guna mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Di tengah persaingan tersebut, UMKM di masing-masing wilayah berupaya mengembangkan usahanya melalui berbagai strategi pemasaran serta peningkatan kapasitas usaha (Zhao dkk., 2020). Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk bertahan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan usaha secara efisien dan efektif dalam menghadapi dinamika pasar yang berubah cepat di era digital. Beberapa poin pembahasan yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut.

### 1) Pemulihan Pasca Covid-19 dan Tren Pertumbuhan Positif

Setelah melewati periode sulit selama pandemi Covid-19, perkembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Barat dalam hampir tiga tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang

positif. Semangat berwirausaha masyarakat juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Data jumlah UMKM per 31 Januari 2023 mencerminkan kondisi pasca pemulihan ekonomi, yaitu sekitar tiga tahun setelah masa krisis akibat pandemi, tanpa memandang jenis usaha maupun skala usahanya.

## **2) Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Mikro**

Seiring membaiknya kondisi pascapandemi, terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha mikro di Kalimantan Barat. Peningkatan ini berkaitan dengan upaya penciptaan lapangan kerja baru, pemulihan ekonomi keluarga, serta strategi bertahan bagi masyarakat yang terdampak pandemi, termasuk mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kota Pontianak mencatat jumlah pelaku usaha mikro tertinggi, yaitu sebanyak 39.697 pelaku, diikuti Kabupaten Landak dengan 32.030 pelaku. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Mempawah dengan 15.632 pelaku, Kabupaten Sintang sebanyak 14.854 pelaku, dan Kabupaten Sambas dengan 14.248 pelaku usaha mikro. Data ini menunjukkan masih rendahnya jumlah pelaku usaha mikro di beberapa wilayah lain di Kalimantan Barat, sehingga diperlukan dorongan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan jumlah pelaku usaha dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong percepatan pertumbuhan usaha kecil dan menengah dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya lokal serta potensi wilayah masing-masing. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sektor kewirausahaan diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja informal sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

## **3) UMKM sebagai Kontributor Utama Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah terbukti kuat dan berkelanjutan. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian wilayah kabupaten/kota dengan kontribusi sekitar 70% terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat pascapandemi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM, termasuk di wilayah dengan jumlah pelaku usaha relatif kecil, tetap memiliki peran signifikan dalam pergerakan ekonomi lokal. Sebagai contoh, Kabupaten Kayong Utara dengan jumlah pelaku usaha kecil terendah, yaitu 671 pelaku, tetap memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi wilayahnya. Kabupaten Melawi mencatat 747 pelaku usaha kecil, sementara wilayah dengan jumlah terendah ketiga berada pada kisaran 992 pelaku. Secara umum, jumlah pelaku usaha kecil di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat berada di atas seribu pelaku, dengan Kabupaten Sambas sebagai wilayah tertinggi dengan 3.880 pelaku usaha kecil aktif.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, potensi perputaran uang di tingkat wilayah cukup besar. Usaha kecil memiliki rata-rata pendapatan sekitar Rp1,63 miliar per tahun atau sekitar Rp5,4 juta per hari. Usaha mikro mencatat rata-rata pendapatan sekitar Rp76 juta per tahun atau Rp253 ribu per hari, sedangkan usaha menengah memiliki rata-rata pendapatan sekitar Rp29,7 miliar per tahun atau sekitar Rp99 juta per hari. Dengan total 195.022 pelaku usaha di berbagai skala, akumulasi omzet harian ini secara signifikan menopang sekitar 70% pertumbuhan ekonomi daerah Kalimantan Barat, sebagaimana dilaporkan oleh BPS Kalbar.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong program "naik kelas" UMKM, yaitu transformasi dari usaha mikro ke kecil, usaha kecil ke menengah, dan seterusnya, guna meningkatkan kualitas serta kontribusi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

## **4) Penyerapan Tenaga Kerja**

Sektor UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kontribusi hampir 97% dari total tenaga kerja nasional berdasarkan kajian Kementerian Koperasi dan UKM. Ketika usaha skala menengah dan besar menghadapi keterbatasan efisiensi serta lemahnya daya saing di tingkat lokal dan regional, UMKM justru membuka peluang penyerapan tenaga kerja usia produktif di wilayah setempat.

Peluang penciptaan lapangan kerja semakin besar ketika usaha kecil mampu berkembang dan naik status menjadi usaha menengah, terlepas dari sektor usaha yang dijalankan. Dengan demikian, penguatan UMKM berperan strategis dalam menekan potensi pengangguran dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi daerah.

## **5) Digitalisasi dan Media Sosial sebagai Alternatif Toko Virtual**

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi mendorong terbentuknya ekosistem digital sebagai pilihan strategi pemasaran dan penjualan yang efektif serta efisien. Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif dan familier dengan berbagai aplikasi digital. Media sosial tidak lagi sekadar sarana hiburan dan edukasi, tetapi telah bertransformasi menjadi platform bisnis dengan kebutuhan modal relatif rendah.

Model bisnis seperti dropshipping menjadi contoh bagaimana pelaku usaha mikro informal dapat menjalankan usaha tanpa harus memiliki toko fisik, persediaan barang, maupun biaya operasional yang besar. Aktivitas usaha cukup dilakukan melalui perangkat digital dengan biaya utama berupa akses data internet. Dengan demikian, keterbatasan dalam pengelolaan usaha, transfer teknologi, serta kendala pemasaran (Caldera dkk., 2019) dapat diminimalkan seiring meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk terus meningkatkan kompetensi dan daya saing.

#### **6) Transformasi Digital sebagai Prasyarat Daya Saing Omzet**

Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi pelaku usaha untuk menjaga daya saing omzet. Banyak UMKM mulai beralih ke platform online seperti media sosial dan marketplace untuk memasarkan produk dan jasa mereka. Model ini tidak memerlukan biaya sewa tempat yang tinggi, dapat diakses selama 24 jam, serta memungkinkan persaingan berbasis kualitas produk dan layanan.

Namun, lemahnya semangat kewirausahaan, keterbatasan informasi, dan akses pasar yang terbatas masih menjadi hambatan utama peningkatan kualitas usaha (Nadab dkk., 2024). Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk beradaptasi dengan tuntutan ekosistem bisnis dan pemasaran digital. Dalam konteks ini, pengelolaan omzet dan laba menjadi indikator kinerja utama, di mana manajemen keuangan yang baik merupakan faktor krusial bagi pertumbuhan usaha, baik skala kecil maupun besar (Hanni dkk., 2023). Kualitas manajemen keuangan secara langsung menentukan keberlanjutan dan daya saing usaha di tengah persaingan digital yang semakin ketat.

#### **7) Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah dalam Mendukung Keberlanjutan UMKM**

Perkembangan UMKM didukung oleh berbagai kebijakan dan program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Program stimulus seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM terbukti membantu pelaku usaha mikro informal untuk bertahan dan berkembang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten/kota perlu mengalokasikan anggaran APBD secara konsisten guna memperkuat posisi dan keberlanjutan UMKM.

Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas manajerial dan kompetensi teknis pelaku UMKM melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang berjenjang dan berkesinambungan, pendampingan teknis oleh dinas terkait, serta penguatan akses permodalan dan pembiayaan. Selain itu, pelatihan terfokus mengenai digitalisasi, transformasi digital, akuntansi keuangan, pemasaran marketplace, manajemen keuangan, dan investasi menjadi kebutuhan mendesak di era pasar bebas.

Dengan demikian, data statistik UMKM yang bersumber dari laporan resmi BPS Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Koperasi dan UKM tidak lagi sekadar angka, melainkan merepresentasikan aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

### **D. Kesimpulan**

UMKM memiliki peran strategis dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Barat pascapandemi Covid-19. Kontribusi UMKM terhadap PDRB daerah dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan pentingnya sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, literasi digital, akses permodalan, dan pengelolaan usaha masih perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penguatan UMKM yang terintegrasi dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kalimantan Barat.

### **E. Referensi**

- Antonakis, J., & Day, D. V. (2018). The nature of leadership development. In J. Antonakis & D. V. Day (Eds.), *The nature of leadership*. Sage Publications.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2023). *Provinsi Kalimantan Barat dalam angka 2023*. BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM*. BPS RI.
- Caldera, H. T. S., Desha, C., & Dawes, L. (2019). Evaluating the enablers and barriers for successful implementation of sustainable business practices in lean SMEs. *Journal of Cleaner Production*, 218, 575–590. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.239>

- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat. (2023). Data UMKM Provinsi Kalimantan Barat. Pontianak.
- Exposito, A., & Sanchis-Llopis, J. A. (2018). Innovation and business performance for Spanish SMEs: New evidence from a multidimensional approach. *International Small Business Journal*, 36(8), 911–931.
- Jordão, R. V. D. (2022). Information, knowledge, and technology in developing economies in times of crises. *The Bottom Line*, 35(2/3), 25–32. <https://doi.org/10.1108/BL-09-2022-134>
- Jordão, R. V. D., Almeida, V. D., & Novas, J. (2022). Intellectual capital, sustainable economic and financial performance, and value creation in emerging markets: The case of Brazil. *The Bottom Line*, 35(1), 1–17.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Data UMKM nasional. KemenKop UKM.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nabbal, F., Afifah, A. N., & Panggiarti, E. K. (2023). Proses akuisisi perusahaan: Strategi, tantangan, dan dampaknya bagi kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 293–298. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1474>
- OECD. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing.
- Sulistiowati, S., Fransiskus, R., Komari, N., & Afifah, N. (2024). How are MSMEs performing following the COVID-19 pandemic? The role of MSME actors' creative self-efficacy, dynamic capability, and innovative work behavior. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(1). <http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v13i1.72440>
- Tambunan, T. (2020). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan*. Ghalia Indonesia.
- Zhao, E. Y., Ishihara, M., & Jennings, P. D. (2020). Strategic entrepreneurship's dynamic tensions: Converging (diverging) effects of experience and networks on market entry timing and entrant performance. *Journal of Business Venturing*, 35(2), 105933. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2019.04.001>